

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era reformasi saat ini, pelaksanaan otonomi daerah yang dijalankan oleh pemerintah daerah semestinya dapat memenuhi kebutuhan rakyat daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Petra & Sari, 2021). Pemerintah daerah sebagai pelaksana otonomi daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan daerah di berbagai sektor. Hal ini sejalan dengan definisi dari otonomi daerah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mendefinisikan Otonomi Daerah ialah hak, kewenangan, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk dapat mengurus urusan pemerintahannya sendiri dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari dilaksanakannya otonomi daerah ini adalah untuk membantu kinerja pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan serta sistem demokrasi dalam memutuskan suatu kebijakan yang akan diambil. Dalam mengembangkan otonomi daerah yang baik dan benar, harus dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, melibatkan partisipasi masyarakat, pembangunan yang merata berlandaskan keadilan untuk seluruh masyarakat, dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Pemerintah daerah juga diharuskan untuk dapat merancang suatu sistem manajemen yang baik guna mendukung pelaksanaan operasional dalam pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mendefinisikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai rencana keuangan pemerintah daerah dalam satu tahun periode yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. APBD terdiri dari anggaran pendapatan dan anggaran belanja serta pembiayaan daerah. Anggaran pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Pendapatan lain yang Sah. PAD meliputi retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lainnya. Dana perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil. Sedangkan pendapatan lain yang sah meliputi Dana Hibah atau Dana Darurat. Untuk anggaran belanja daerah terdiri dari belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa dan belanja lainnya. Dan pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu untuk dikeluarkan dan akan diterima kembali pada tahun anggaran berjalan maupun berikutnya.

Pemerintah daerah menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen kebijakan utama dalam pengembangan kemampuan dan efektivitas daerah (Lillo, 2021). Selain itu, APBD juga digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan tingkat pendapatan dan pengeluaran suatu daerah, sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan, pedoman dalam menjamin dan mengarahkan pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan sebagai alat ukur kinerja dari pemerintah daerah/instansi (Lillo, 2021). Dengan APBD yang dijadikan pedoman oleh Pemerintah Daerah, diharapkan dapat memotivasi manajemen agar dapat bekerja secara efektif, efisien, dan ekonomis dalam mencapai target kinerja sesuai dengan yang telah dianggarkan.

Akuntabilitas dan transparansi menjadi poin penting dalam pelaksanaan APBD yang harus dilakukan oleh Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas segala aktivitas pengelolaan anggaran kepada masyarakat (Susanti et al., 2021). Pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban dari setiap pelaksanaan program kerja yang dilaksanakan secara transparan. Berdasarkan hal tersebut, pengukuran kinerja keuangan memiliki peranan yang sangat penting pada organisasi sektor publik karena digunakan untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi dari kinerja organisasi tersebut. Kinerja keuangan juga dapat digunakan sebagai aspek dalam melakukan pengukuran kinerja. Kinerja keuangan yaitu suatu proses analisis berguna untuk menilai suatu organisasi apakah telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kinerja keuangan ini dapat memberikan gambaran terkait dengan kondisi keuangan suatu organisasi publik apakah memiliki hasil kinerja yang baik atau buruk dalam suatu periode (Aprillia, 2022).

Efektivitas dan efisiensi dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai suatu pencapaian yang telah dilakukan oleh organisasi. Efektivitas merupakan suatu dasar pengukuran terhadap keberhasilan yang didapat oleh organisasi dalam mencapai target yang telah ditentukan. Sedangkan pengertian dari efisiensi adalah tingkat pemanfaatan dari suatu *input* minimal dalam mencapai hasil semaksimal mungkin (Lillo, 2021). Efisiensi digunakan oleh organisasi untuk mengukur *input* yang telah dilakukan apakah telah mencapai sasaran atau target dengan benar. Berdasarkan pada indikator *value for money*, rasio perbandingan *output* dan *input* digunakan untuk

mengukur suatu efisiensi. Semakin tinggi nilai *output* dibandingkan dengan nilai *input*, maka tingkat efisiensi pada organisasi tersebut juga semakin tinggi.

Laporan realisasi anggaran merupakan salah satu bentuk dari laporan pertanggungjawaban yang disajikan oleh pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan hasil kinerja keuangannya dalam satu tahun periode (Susanti et al., 2021). Dengan disajikannya laporan realisasi anggaran tersebut, merepresentasikan pentingnya peranan anggaran dalam organisasi karena digunakan sebagai alat distribusi dan stabilitas sumber daya publik serta digunakan sebagai alat pengendalian dan penilaian kinerja dari suatu organisasi. Sehingga, pengukuran terhadap tingkat efektivitas dan efisiensi dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah menjadi sangat penting untuk dilakukan karena digunakan untuk menilai kinerja keuangan dari pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran yang telah ditetapkan. Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran yang bersumber dari Bendahara Umum Negara/Daerah yang sifatnya mengurangi saldo anggaran yang telah ditetapkan (Purba & Silalahi, 2021). Belanja dalam anggaran organisasi sektor publik seharusnya dapat dimanfaatkan secara maksimal penggunaannya untuk kepentingan masyarakat, namun pada kenyataannya masalah serapan anggaran ini masih belum terlaksana secara maksimal.

Penelitian terdahulu dari Petra dan Sari (2021) yang relevan dan dapat dijadikan sebagai pembanding pada penelitian ini yaitu dengan judul “Analisa Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat”, dengan hasil penelitian bahwa tingkat efektivitas anggaran Pendapatan Asli Daerah Pemerintah kota Padang mengalami

penurunan dari periode anggaran tahun 2018-2019. Penurunan tersebut disebabkan oleh kinerja Pemerintah Kota Padang yang belum maksimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan target yang dianggarkan. Dan tingkat efisiensi anggaran Pendapatan Asli Daerah tahun 2018-2019 dikategorikan cukup efisien.

Penelitian terdahulu yang lainnya dilakukan oleh Widowati & Fatimah (2022) dengan judul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah pada BPKAD Pemerintah Kota Magelang (Tahun 2015-2018), dengan hasil penelitian bahwa tingkat efektivitas yang diperoleh memiliki kriteria yang berubah-ubah setiap tahunnya. Pada tahun 2015 mengalami penurunan dan dikategorikan kurang efektif, sedangkan di tahun 2016-2018 mengalami kenaikan dan dikategorikan cukup efektif. Namun, pencapaian anggaran masih tergolong rendah dari anggaran yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk tingkat efisiensi anggaran dari tahun 2015-2018 memenuhi syarat efisiensi karena telah dikelola dengan baik.

Pandemi covid-19 yang melanda dunia dan Indonesia yang juga terkena dampaknya dari segala bidang, yang salah satunya yaitu ekonomi. Ekonomi Indonesia selama pandemi covid-19 dalam kondisi yang lemah sehingga mengakibatkan banyaknya perusahaan yang terpaksa untuk memutus hubungan kerja sebagian besar pegawainya. Dilansir dari laman liputan6.com dengan judul “Kemnaker : 72.983 Pekerja Kena PHK Selama Pandemi Covid-19” diperoleh informasi bahwa dari hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada bulan November 2021 sebanyak 72.983 karyawan telah di PHK dan jumlah tersebut akan terus bertambah hingga akhir tahun 2022. Dengan banyaknya kasus PHK tersebut, berdampak pada

peningkatan jumlah pelaku UMKM yang ada di Indonesia. Banyaknya jumlah UMKM di Indonesia berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM terdapat lebih dari 64 juta. Banyaknya UMKM tersebut merepresentasikan bahwa sekitar 97% tenaga kerja Indonesia merupakan pelaku UMKM. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti ingin menentukan objek penelitian yaitu Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur terkait dengan bagaimana kinerja keuangannya dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam membantu UMKM khususnya di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur merupakan dinas yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membantu tugas Gubernur sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi dalam melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Sehingga peran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur sangat dibutuhkan untuk membantu para pelaku UMKM khususnya di Provinsi Jawa Timur. Melalui proses penganggaran dengan menyesuaikan kebutuhan bagi para UMKM yang ada misalnya dengan memiliki program kerja yang dapat membantu para pelaku UMKM dalam bidang permodalan, pelatihan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan lain sebagainya. Dan diharapkan dalam pelaksanaannya, realisasi dari anggaran yang telah ditetapkan dapat terealisasi secara efektif dan efisien agar dapat membantu dan mensejahterakan masyarakat.

Berikut ini merupakan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019-2021 :

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan PAD pada Laporan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur

Tahun Anggaran	Target Penerimaan PAD	Realisasi Penerimaan PAD
2019	Rp 350.000.000,00	Rp 422.680.407,49
2020	Rp 217.300.000,00	Rp 401.203.731,42
2021	Rp 355.000.000,00	Rp 305.871.244,98

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Anggaran Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur

Tahun Anggaran	Target Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Belanja
2019	Rp 93.403.016.200,00	Rp 89.949.892.857,00
2020	Rp 58.772.999.450,00	Rp 56.696.017.165,00
2021	Rp 77.345.833.700,00	Rp 73.836.514.889,00

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur

Latar belakang pemikiran di atas ditambah dengan keinginan penulis untuk meneliti mengenai efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, maka dari itu penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan

judul “**Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat Efektivitas Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur diukur dengan Analisis Rasio Efektivitas ?
2. Bagaimana tingkat Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Daerah pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur diukur dengan Analisis Rasio Efisiensi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis dan mengetahui tingkat efektivitas realisasi anggaran pendapatan asli daerah pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur diukur dengan analisis rasio efektivitas.
2. Menganalisis dan mengetahui tingkat efisiensi realisasi anggaran belanja daerah pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur diukur dengan analisis rasio efisiensi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dengan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada Akuntansi Sektor Publik serta menjadi dasar untuk evaluasi kinerja keuangan bagi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan meneliti hal serupa maupun lebih dalam terkait topik ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis
Penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi akhir strata 1 program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
- b. Bagi Peneliti Selanjutnya,
Penelitian ini diharapkan dapat untu digunakan oleh peneliti selanjutnya sebagai sumber referensi pengetahuan dan bahan pertimbangan.
- c. Bagi Pemerintah Daerah
Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur pada bidang pengkajian nilai efektivitas dan efisiensi dalam realisasi anggaran pendapatan dan belanja di masa yang akan datang.